

Nomor : B/ 361 /AA.05/2023

27 November 2023

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

di

Surabaya

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada **Pemerintah Provinsi Jawa Timur**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya. Khusus pada tahun 2023, beberapa instansi pemerintah juga dipilih untuk dilakukan pendalaman atas upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti **sebagian besar** rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Telah melakukan perbaikan terhadap pohon kinerja di beberapa Perangkat Daerah dengan mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
- b. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi *SIKIP* dengan memberlakukan proses verifikasi terhadap dokumen data kinerja yang telah diunggah Perangkat Daerah;
- c. Telah dilakukan review disertai rekomendasi perbaikan pada Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 agar menyampaikan informasi analisa yang memadai sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014;
- d. Telah menyampaikan rekomendasi secara teknis dalam bentuk berita acara hasil evaluasi.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa nilai sebesar **83,89** dengan predikat **"A"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Memuaskan"**, yaitu **instansi pemerintah dan juga unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	26,85	26,95
b. Pengukuran Kinerja	30	24,98	25,00
c. Pelaporan Kinerja	15	12,90	12,80
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,10	19,14
Nilai Hasil Evaluasi	100	83,83	83,89
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pohon kinerja yang disusun belum sepenuhnya berdasarkan kerangka berpikir logis (*logical framework*), hal ini disebabkan masih ditemukan penjenjangan kinerja dimana antar level kinerja kondisi kinerjanya sama atau *redundant* sehingga hubungan antar level kinerja belum sepenuhnya berdasarkan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja;
- Identifikasi *crosscutting* pada pohon kinerja pemerintah daerah belum sepenuhnya memberikan gambaran yang logis karena belum ada penetapan kondisi kinerja pada *sharing outcome* antar lintas tugas dan fungsi perangkat daerah;
- Penetapan kinerja program dan kegiatan belum seluruhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis sehingga berpotensi adanya kinerja program dan kinerja kegiatan yang realisasinya tercapai, namun target sasaran strategis tidak tercapai.

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Hasil *monitoring* dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai perbaikan strategi dan aktivitas-aktivitas utama untuk perencanaan kinerja berikutnya, karena masih terdapat realisasi pencapaian target kinerja yang belum sepenuhnya tercapai;
- Kinerja individu yang tertuang pada sasaran kinerja pegawai (SKP) belum sepenuhnya menunjang pencapaian kinerja organisasi/perangkat daerah. Hal ini dapat dilihat pada penyusunan matriks peran hasil yang menggambarkan hubungan kinerja individu dan kinerja organisasi/perangkat daerah yang tidak saling mempengaruhi.

3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Laporan kinerja pada sebagian kecil perangkat daerah belum sepenuhnya menyampaikan informasi analisa yang memadai, yaitu terkait dengan analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan secara detail per-pencapaian kinerja yang dimiliki;

- Pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan, hal ini dapat dilihat dari penetapan target kinerja perencanaan kinerja tahun berjalan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya memberikan temuan dan rekomendasi spesifik terkait komponen/kriteria yang perlu ditingkatkan beserta masalahnya. Selain itu, antara temuan dan rekomendasi masih ditemukan di beberapa perangkat daerah belum sinkron sehingga terdapat temuan yang tidak memiliki rekomendasi.

5) Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

Evaluasi akuntabilitas terhadap upaya pengelolaan program kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan 1). mendapatkan gambaran umum pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui presentasi dan diskusi, serta 2). menganalisis efektivitas biaya (*cost-effectiveness analysis*) yang dilakukan dengan membandingkan data anggaran kemiskinan pada SIPD dengan data penurunan jumlah masyarakat miskin pada data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) BPS. Berdasarkan hasil evaluasi, didapat hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan data SIPD, besaran alokasi belanja dengan *tagging* penanganan kemiskinan ekstrem pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp 5.114.061.487.687 atau 16,43% dari total pos belanja APBD. Alokasi tersebut digunakan untuk membiayai 132 sub kegiatan;
- Belanja terbesar penanganan kemiskinan ekstrem dialokasikan pada sub kegiatan “pengelolaan dana BOS sekolah menengah kejuruan” yaitu sebesar 25,81% dan terkecil adalah pada sub kegiatan “fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah dan /atau identitas anak” yang hanya 0,00044%;
- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada Maret 2023, tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 10,35% atau turun 0,03% dibandingkan dengan tahun 2022;

- Hasil analisis tim evaluator masih menemukan adanya sub kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kemiskinan ekstrem, serta alokasi anggaran pendukung (konsumsi rapat, biaya operasional, perjalanan dinas, dan lainnya).

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mereviu kembali pohon kinerja yang dimiliki agar dapat disusun berdasarkan *logical framework*, yaitu dengan memastikan penjenjangan kinerja sudah mengkaitkan *critical success factor* (CSF) sehingga tidak terjadi kondisi kinerja yang sama/*redundant* yang antar level;
- 2) Memastikan kembali pengidentifikasian *crosscutting* pada pohon kinerja pemerintah daerah untuk menetapkan kondisi kinerja yang menggambarkan *sharing outcome* antar lintas tugas dan fungsi perangkat daerah yang logis sehingga dapat tercipta perencanaan kinerja yang kolaboratif;
- 3) Melakukan reviu pada penetapan kinerja program dan kegiatan agar lebih berfokus menjaga pencapaian kinerja strategis sehingga pencapaian kinerja strategis lebih efektif dan efisien;
- 4) Mendorong adanya optimalisasi pemanfaatan hasil *monitoring* dan evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan strategi dan aktivitas-aktivitas utama untuk perencanaan kinerja berikutnya sehingga terjadi peningkatan pencapaian target kinerja;
- 5) Memastikan kembali perumusan kinerja individu setiap pegawai (SKP) benar-benar terkait dengan kinerja organisasi dengan cara memastikan matriks peran hasil yang disusun dapat menggambarkan keterkaitan kinerja individu dengan kinerja organisasi/perangkat daerah;
- 6) Memastikan laporan kinerja pada seluruh perangkat daerah untuk dapat menyampaikan informasi analisa yang memadai, yaitu terkait analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan secara detail per pencapaian kinerja yang dimiliki;
- 7) Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja;

- 8) Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memastikan laporan tersebut berisi temuan dan rekomendasi yang sesuai pada komponen/kriteria sekaligus memastikan kesesuaian antara temuan dan rekomendasi sehingga hasil dapat dimanfaatkan untuk perbaikan implementasi SAKIP perangkat daerah;
- 9) Terkait dengan tema kemiskinan, diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan penyempurnaan pohon kinerja kemiskinan dengan memperhatikan faktor-faktor lapangan yang menyebabkan kemiskinan di wilayah Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat diketahui permasalahan kinerja utama apa saja yang menjadi fokus utama dalam pengentasan kemiskinan;
- 10) Mendorong keterlibatan seluruh *stakeholders* di wilayah Provinsi Jawa Timur, baik internal pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun eksternal, dengan berdasarkan informasi *crosscutting* dan strategi kinerja yang sudah disusun berdasarkan pohon kinerja kemiskinan yang dimiliki;
- 11) Mendorong pimpinan daerah beserta Bappeda agar melakukan reviu atas seluruh program, kegiatan, serta aktivitas yang ada beserta anggarannya dengan memanfaatkan pohon kinerja kemiskinan yang telah disusun, sehingga dapat diketahui sejauh mana perencanaan dan penganggaran yang telah direncanakan dapat berdampak dalam menurunkan kemiskinan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto
Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Timur.